

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ETNIS TIONGHOA DALAM KERUSUHAN MEI 1998 DI SURABAYA

Sandra Anggraeni

Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
sandra.17040284051@mhs.unesa.ac.id

Sri Mastuti Purwaningsih

Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
srimestuti@unesa.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di Indonesia tepatnya di Surabaya tidak terlepas dari era pemerintahan Orde Baru, adanya pandangan buruk yang diberikan etnis pribumi terhadap etnis Tionghoa setelah peristiwa G30S PKI membuat etnis Tionghoa mengalami perlakuan diskriminasi dalam bentuk kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kekerasan seksual lebih dialami oleh perempuan khususnya perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998 dan pandangan seperti apa yang diberikan etnis pribumi terhadap etnis Tionghoa selama Orde Baru berlangsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu *heuristik*, *kritik*, *intepretasi*, dan *historigrafi*, dibagian *kritik* peneliti melakukan uji kritik untuk mengetahui tingkat kebenaran sumber yang telah didapat baik dari wawancara narasumber atau studi kearsipan yang didapat dari Komnas Perempuan dan Tesis dari Evi Lina Sutrisno. Dan penulis meyakini sumber wawancara yang didapat dari Komnas Perempuan dapat dipercaya karena Komnas Perempuan memiliki dokumen berupa Catahu Komnas Perempuan (Catatan Tahun Komnas Perempuan) dan Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan yang ada tiap tahunnya dan memiliki seri setiap laporannya dan Tesis dari Evi Lina Sutrisno karena Evi merupakan aktivis sekaligus mahasiswa yang menjadi saksi kerusuhan Mei 1998 di Surabaya dan dibagian *Intepretasi* menggunakan pendekatan teori Foucault yaitu diskursus relasi-pengetahuan.

Kata Kunci: Kekerasan perempuan etnis Tionghoa, Kerusuhan Mei 1998, Orde Baru

Abstract

Violence against Chinese Indonesian women in the May 1998 Riots of Indonesia, particularly that took place in Surabaya, is related to the New Order administration. The negatives sentiments towards Chinese Indonesians which many natives Indonesians still have after 30 September Movement (G30S/PKI) led to the discrimination of Chinese Indonesians in the form of numerous policies that passed by the government. The aim of this study is to find out the reason why many Chinese Indonesian women suffers more from sexual violence during the 1998 event and the native Indonesians' perception towards Chinese Indonesians during the New Order era.

Using historical research methodologies (heuristic, verification, interpretation, and historiography), this study used data triangulation for the verification method to determine the validity of data that were collected from in-depth interviews and archival research in National Commission on Violence Against Women (KOMNAS Perempuan) and Evi Lina Sutrisno's thesis. The researcher believes that those data are valid because 1) National Commission on Violence Against Women (KOMNAS Perempuan) have documents in the form of Catahu Komnas Perempuan (Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan/National Commission on Violence Against Women's Yearly Report) and a series of documents called Seri Dokumen Kunci KOMNAS Perempuan that are published every year, and 2) Evi Lina Sutrisno was an activist and a witness of May 1998 Riots in Surabaya. For the Interpretation method, this study adopted Foucault's theory of Power Knowledge.

Keywords: Violence against ethnic Chinese women, May 1998 riots, New Order

Pendahuluan

Konflik kerusuhan Mei 1998 di Indonesia tidak terlepas dari era pemerintahan Orde Baru, dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia seperti tidak ada henti - hentinya. Puncak dari permasalahan ekonomi ini yaitu konflik kerusuhan Mei 1998, diawali dengan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial di Asia pada tahun 1997 kemudian disusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa hingga terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti serta penindasan terhadap etnis Tionghoa membuat Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1998, tercatat dalam sejarah kerusuhan Mei 1998 tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di kota - kota besar lainnya seperti Medan, Surakarta, dan Surabaya. Bentuk kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota di Indonesia diantaranya adalah penjarahan, penghancuran rumah dan toko, pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pembunuhan¹.

Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya memang sedikit berbeda dengan yang terjadi di Jakarta yang telah memakan banyak korban terutama etnis Tionghoa tetapi di Surabaya tepatnya di daerah pinggiran seperti Semampir, Pengirian, Wonokusumo, Sidotopo, dan beberapa daerah di Surabaya Barat² mengalami dampak dari kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 14 Mei 1998 hingga hampir subuh, diperkirakan sekitar 6-7 truk bergerak menuju wilayah Semampir dengan diiringi banyak motor dan penjarahan pun terjadi di toko milik etnis Tionghoa. Selain itu, di Sidotopo dan beberapa daerah di Surabaya juga mengalami hal sama seperti penjarahan terhadap toko milik etnis Tionghoa terlebih lagi beberapa perempuan etnis Tionghoa mengalami tindakan kekerasan seksual dengan diperkosa secara bergilir dan kejadian ini dilakukan didalam ruko milik etnis Tionghoa, paling tragis mereka disiksa, diperkosa, dan dirusak tubuhnya didepan keluarga mereka dan yang menjadi fokus dari penelitian penulis disini adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa di Surabaya. Menurut laporan dari TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) di Surabaya bahwa pelaku dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya teridentifikasi terdiri dari 3 kelompok yaitu massa aktif atau massa pendatang yang bergerak

terorganisir, massa pasif atau massa lokal yang terlebih dahulu mengamati kemudian ikut serta, dan provokator yang terprovokasi atau massa yang terprovokasi.³

Alasan peneliti mengambil topik ini dikarenakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 menjadi masalah kompleks yang dihadapi Indonesia pada tahun 1998 dan sedikit yang membahas lebih dalam mengenai kekerasan terhadap perempuan Etnis Tionghoa saat kerusuhan Mei 1998⁴, lebih terfokus pada kerusuhan Mei 1998 dan alasan pemilihan Surabaya dikarenakan Surabaya disebut kota aman dari kerusuhan Mei 1998 namun kenyataannya beberapa daerah di Surabaya mengalami dampak dari kerusuhan ini dan targetnya adalah etnis Tionghoa, terlebih lagi terkena dampaknya paling serius adalah perempuan etnis Tionghoa yang merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual dari kelompok minoritas dikarenakan perempuan dari kelompok minoritas memiliki interseksi identitas seperti gender, ras, kelas, dan agama yang menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan seksual terutama kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Surabaya sehingga perlu adanya pembahasan lebih dalam mengenai topik ini⁵.

Kasus kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 di Surabaya yang diterima oleh perempuan etnis Tionghoa memang tidak sebanyak yang berada di Jakarta. Namun, menurut laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dan Komnas Perempuan menyebutkan kerusuhan Mei 1998 juga terjadi di Surabaya dan penjarahan terjadi di toko milik etnis Tionghoa, dan lebih dari 3-5 perempuan etnis Tionghoa mengalami kekerasan seksual saat penjarahan terjadi⁶. Kekerasan terhadap perempuan Etnis Tionghoa di Surabaya bermula dengan terjadinya kemarahan massa akibat penembakan 4 mahasiswa Trisakti di Jakarta dan aksi tersebut dikembangkan oleh kelompok politik tertentu dan menjadikan kerusuhan Mei 1998 sebagai kerusuhan anti Cina dengan melakukan berbagai tindak diskriminasi dikarenakan etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas di Indonesia sejak Kemerdekaan Indonesia dan didukung dengan munculnya stereotip sehingga etnis Tionghoa khususnya para perempuannya mendapatkan perlakuan diskriminasi

¹ Adara Primadia, *Kerusuhan Mei 1998-Latar Belakang dan Kronologinya* <https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pasca-kemerdekaan/kerusuhan-mei-1998> diakses pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 19.23 WIB

² Vanny El Rahman, *Pemerkosaan dan Sejarah Kelam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya* <https://jatim.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/pemerkosaan-dan-sejarah-kelam-kerusuhan-mei-1998-di-surabaya> , diakses pada 7 Agustus pukul 20.00 WIB

³ Aryono, *Kesaksian Kerusuhan Mei 1998* <https://historia.id/politik/articles/kesaksian-kerusuhan-mei-1998-DBKzr/page/1> diakses pada 8 Februari 1998 Pukul 20.37 WIB

⁴ Chandra Linsa Hikmawati, *Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta*, (Jakarta: Jurnal Politik Komnas Perempuan, 2017) hlm 338

⁵ *Ibid.*, hlm. 339

⁶ Aryono, *Loc. Cit.*

setelah puncak kerusuhan Mei 1998, dimana sejumlah perempuan etnis Tionghoa mengalami kekerasan seksual⁷.

Melihat adanya pandangan buruk yang muncul dan ditujukan kepada etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 memunculkan berbagai macam perlakuan diskriminasi dalam bentuk kekerasan seksual yang ditargetkan kepada perempuan etnis Tionghoa dikarenakan tubuh perempuan selalu menjadi target penyerangan dalam situasi konflik seperti kerusuhan Mei 1998 dengan cara yang klasik dalam sejarah yaitu dengan pemerkosaan, dimana tubuh perempuan dimanfaatkan untuk menghancurkan ras asal si perempuan⁸. Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa diantaranya adalah perkosaan, percobaan perkosaan, dan ancaman perkosaan. Tim relawan terhadap kekerasan terhadap perempuan mengidentifikasi permasalahan kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 di Surabaya, tidak hanya kekerasan seksual secara fisik tetapi terdapat kekerasan seksual secara verbal seperti candaan atau gurauan, cacian atau hinaan, dan kalimat – kalimat yang bernada merendahkan lainnya.

Dampak kekerasan yang diterima oleh beberapa perempuan etnis Tionghoa, beberapa korban mengalami trauma baik secara fisik maupun mental. Trauma fisik yang dialami para korban secara umum adalah radang sendi, nyeri panggul kronis, masalah pencernaan, gejala pramenstruasi yang intens, kejang *non-epilepsi*, sedangkan trauma mental yang dialami para korban secara umum adalah *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)* yang menyebabkan rasa takut, gangguan kecemasan, rasa marah, dan bersalah. Dalam beberapa kasus menurut catatan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) beberapa korban pasca kejadian mengalami trauma sehingga berakibat pada korban meninggal dunia, melakukan tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, menutup diri hingga harus pindah ke lokasi lainnya (pindah kota atau bahkan pindah negara)⁹.

Dengan demikian kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan etnis Tionghoa dikatakan sebagai tindakan diskriminasi karena munculnya stereotip yang diterima oleh etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998. Motifnya tidak lain karena perempuan merupakan kaum paling rentan mengalami kekerasan seksual, terlebih lagi perempuan dari ras minoritas seperti etnis Tionghoa. Mereka yang sengaja melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan etnis Tionghoa semata – mata untuk menghancurkan ras minoritas dan perempuan juga disebut sebagai simbol kehormatan bagi komunitas sehingga penghancuran etnis

Tionghoa melalui perempuan etnis Tionghoa sangat rentan terjadi saat kerusuhan Mei 1998, maka disini penulis ingin mengangkat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Etnis Tionghoa di Surabaya dalam Kerusuhan Mei 1998 dengan artikel berjudul **“Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya”**.

Metode

Kuntowijoyo berpendapat bahwa metode penelitian sejarah memiliki empat tahapan, yaitu: *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi*.¹⁰ Untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah, dengan langkah – langkah sebagai berikut:

Heuristik, tahap ini merupakan tahapan mengumpulkan sumber – sumber sejarah dan dalam tahap ini penulis mengumpulkan sumber melalui metode wawancara dengan beberapa etnis Pribumi terkait pandangan mereka terhadap kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya sebagai sumber sekunder. Untuk wawancara saksi kejadian saat kerusuhan Mei 1998 di Surabaya penulis hasil wawancara Evi Lina Sutrisno dalam tesis yang berjudul *The May 1998 Riot in Surabaya: Through Local People's Perspective* (2002) di Universitas Amsterdam dalam artikel IDN Times Jatim oleh Vanny El Rahman dan untuk korban kekerasan seksual penulis menggunakan hasil wawancara dari Komnas Perempuan dengan para korban setelah tahun 1998 yaitu laporan akhir tim gabungan pencari fakta peristiwa 13-15 Mei 1998 (laporan investigasi Komnas Perempuan dengan para korban kekerasan seksual) pada Agustus 2006, laporan hasil dokumentasi pelapor khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 1998 dan dampaknya pada 13 Mei 2008, dan rekam jejak Komnas Perempuan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada tahun 2014. Disini penulis memakai data wawancara peneliti lain dan Komnas Perempuan dikarenakan korban kekerasan seksual dirahasiakan oleh Komnas Perempuan kepada publik dan untuk saksi dari kerusuhan Mei 1998 sudah tidak tinggal di Surabaya, ada yang sudah menetap di luar negeri dan Jakarta.

Tahap selanjutnya merupakan tahap *kritik* untuk menguji kebenaran (validitas) dari sumber Sejarah. Menurut I Gede Widja, kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Kritik ekstern*, kegiatan untuk menguji keaslian sumber (asli atau palsu sumber tersebut).
2. *Kritik intern*, tahap ini merupakan tahap menguji *kredibilitas* dan *realibilitas* dari sumber sejarah, kritik

⁷ Prinsia Nurul Ikasari, *Perempuan Dalam Diskriminasi Etnis Di Indonesia*, (Magelang: Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, 2017) hlm 59-60

⁸ Chandra Linsa Hikmawati, op.cit, hlm 351

⁹ Ita F. Nadia, *Perkosaan Massal 1998 itu Terjadi* (<https://tirto.id/perkosaan-massal-1998-itu-terjadi-cpa2>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 19.58 WIB)

¹⁰Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 19

intern ini dilakukan untuk membuktikan keaslian dari sumber yang dicari.¹¹

Melalui penelitian ini, peneliti melakukan uji kritik untuk mengetahui tingkat kebenaran sumber yang telah didapat baik dari wawancara narasumber atau studi kearsipan yang didapat dari Komnas Perempuan dan Tesis dari Evi Lina Sutrisno. Dan penulis meyakini sumber wawancara yang didapat dari Komnas Perempuan dapat dipercaya karena Komnas Perempuan memiliki dokumen berupa Catakhu Komnas Perempuan (Catatan Tahun Komnas Perempuan) dan Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan yang ada tiap tahunnya dan memiliki seri setiap laporannya dan Tesis dari Evi Lina Sutrisno karena Evi merupakan aktivis sekaligus mahasiswa yang menjadi saksi kerusuhan Mei 1998 di Surabaya kemudian kedua data tersebut di uji kritik baik secara intern maupun ekstern dengan hati – hati untuk membuktikan tingkat keaslian dari kedua sumber dalam penelitian ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Tahap selanjutnya adalah *intrepretasi* yang merupakan penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Interpretasi merupakan cara penulis menetapkan makna dan keterkaitan atau hubungan antara fakta – fakta yang berhasil dikumpulkan oleh penulis.¹² Interpretasi sejarah memiliki dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan dan keduanya disebut sebagai metode utama dalam intrepretasi (Abdurahman, 2007: 53). Menurut Gilbert J. Garraghan (Herlina 2011: 39) Interpretasi terbagi menjadi lima jenis yaitu interpretasi verbal, interpretasi teknis, interpretasi logis, interpretasi psikologis, dan intrepretasi faktual.

Dalam tahap ini, penulis memakai teori sex dan gender yang dibahas dalam karya Peter Burke yang berjudul “Sejarah dan Teori Sosial” untuk menguji asumsi permasalahan kekerasan terhadap perempuan Etnis Tionghoa dengan pendekatan sex dan gender. Menurut Butler (dalam Burke 2005: 75) Penekanan feminisme pada sebuah kontruksi budaya dalam gender sama dengan penekanan kontruksi budaya secara umum sehingga memunculkan dampak besar bagi praktik sejarah. Peter menjelaskan proses kontruksi gender secara sosial atau kultural merupakan bagian dari objek kajian kesejarahan sehingga memunculkan pendekatan terhadap seks yang telah di konseptualisasikan oleh Michel Foucault, pendekatan oleh Foucault ini ialah diskursus relasi pengetahuan yang diperluas dan diperdalam untuk menguji asumsi – asumsi oleh para antropolog dan sejarah

klasik yang mencoba menyusun kembali terkait kegiatan seksual di berbagai kebudayaan. Hubungan seksual sesama laki – laki itu tidak memalukan, tetapi yang membuat harga diri terancam adalah peranan sebagai pihak dikuasai atau sebagai wanita (Faoucault 1976: 84). Disini penulis menganalisis sex dan gender berdasarkan teori yang telah di kemukakan diatas dan sekaligus membandingkan sumber data yang telah diperoleh dan telah di uji melalui tahap kritik kemudian dilakukannya tahap analisis dan sintensis untuk menghubungkan makna dengan fakta – fakta yang telah diperoleh baik dari wawancara dan studi kearsipan kedalam lima jenis intrepretasi untuk mendapatkan hasil data yang saling keterhubungan dan menyatu.

Tahap terakhir ini adalah *historiografi* yang merupakan tahap penulisan penelitian sejarah dengan merangkai fakta – fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data – data yang telah dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menuliskan hasil pemahamannya tentang kekerasan seksual dalam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya dan data – data yang telah di interpretasi dalam bentuk Artikel Ilmiah/Skripsi.

Hasil dan Pembahasan Relasi sosial-ekonomi etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi

Sebelum adanya kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru secara tidak langsung memecahkan persatuan antar etnis yang ada terutama etnis Tionghoa dengan pribumi, terdapat adanya hubungan relasi secara sosial – ekonomi di Surabaya yang sempat terjadi dari masa kolonial. Hubungan ini di mulai karena penduduk Indonesia terutama di Surabaya terdiri dari penduduk asli (pribumi) dan pendatang (non-pribumi), terutama orang-orang keturunan Tionghoa yang menunjukkan keragaman dari perbedaan suku, agama, budaya dan lain-lain. Relasi ini terjalin cukup lama dikarenakan penduduk etnis Tionghoa yang telah lama hidup di Indonesia telah membaaur, melakukan perkawinan campuran, berasimilasi tanpa paksaan, dan berakulturasi budaya. Selain itu, system sosial yang terbilang unik telah mendukung etnis Tionghoa membaaur dengan etnis pribumi dan sekaligus kemahiran dalam hal perdagangan sehingga terjadinya timbal balik diantara etnis Tionghoa dengan pribumi.

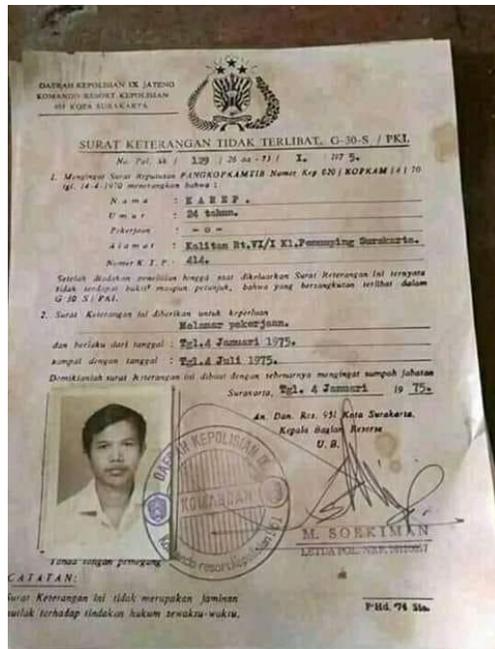
Namun, setelah pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan – kebijakan kepada etnis Tionghoa membuat adanya batasan untuk berhubungan dengan etnis Tionghoa. Salah satunya dalam kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi yaitu PP No. 10/November 1959 yang melarang masyarakat etnis Tionghoa berdagang di wilayah pedesaan sehingga membuat etnis Tionghoa sulit membaaur dengan masyarakat pribumi terutama di wilayah pedesaan. Dan secara sosial, Pemerintah Orde Baru juga melarang kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat

¹¹ I Gede Widja *Sejarah Lokal: Suatu Prespektif dalam Pengajaran Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989, hlm. 24

¹² Nugroho Notosusantoo, *Norma – norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta: Pusat Sejarah Abri Dephankam, 1971, hlm. 17

istiadat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam kasus G30S PKI sebelumnya, karena PKI menjadi anti klimaks dalam hubungan antara orang Tionghoa dan masyarakat pribumi, dan orang Tionghoa dicurigai memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya. Sentimen nasionalis mereka terhadap negara Indonesia menyebabkan dikeluarkannya kebijakan yang dianggap sangat diskriminatif terhadap suku bangsa.

Gambar 1. Surat Keterangan tidak terlibat dalam aksi G30S PKI



Sumber:

<https://www.tionghoa.info/g30spki-1965-apa-efeknya-bagi-tionghoa-di-indonesia/>

Surat tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa individu tersebut tidak terlibat dalam G30S PKI dan surat ini diperuntukan bagi etnis Tionghoa yang ingin mengurus berkas – berkas yang berkaitan dengan Negara.

Identitas yang dibangun pemerintah terhadap etnis Tionghoa

Tionghoa perantauan Indonesia terbagi menjadi dua bagian, *Totok* dan *Peranakan*. Etnis Tionghoa *Totok*, meskipun pernah tinggal di Indonesia sebelum kemerdekaan, tetap mempertahankan budaya Tionghoa, menghindari perkawinan dengan penduduk asli, dan memiliki makna etnis Tionghoa sejati. *Peranakan*, di sisi lain, adalah keturunan dari pernikahan adat Tionghoa¹³.

Namun memasuki era Orde Baru, kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk membangun identitas

etnis Tionghoa setelah adanya kecurigaan mengenai rasa nasionalisme etnis Tionghoa *totok* terhadap Indonesia sejak peristiwa G30S PKI¹⁴. Identitas yang telah dibangun pemerintah ini sehingga mengeluarkan kebijakan terhadap etnis Tionghoa termasuk dalam relasi kuasa yang telah dipaparkan oleh Foucault. Menurut Foucault kekuasaan dalam relasi kuasa beroperasi secara terus menerus hingga menciptakan pengetahuan dan begitu sebaliknya, pengetahuan telah mengumsikan sebarang implikasi dari pengetahuan. Pengetahuan menurut Foucault sendiri ialah kalimat yang bisa diucapkan seseorang dalam suatu praktek diskursif (kekuasaan) dan tidak bisa dispesifikasikan oleh kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan satu ruangan dimana subyek bisa menempati satu posisi dan berbicara mengenai obyek – obyek yang dikenalnya dalam diskursus. Pengetahuan adalah wilayah koordinasi dan subordinasi pertanyaan – pertanyaan dimana konsep tampak, didefinisikan, diaplikasikan dan ditransformasikan.

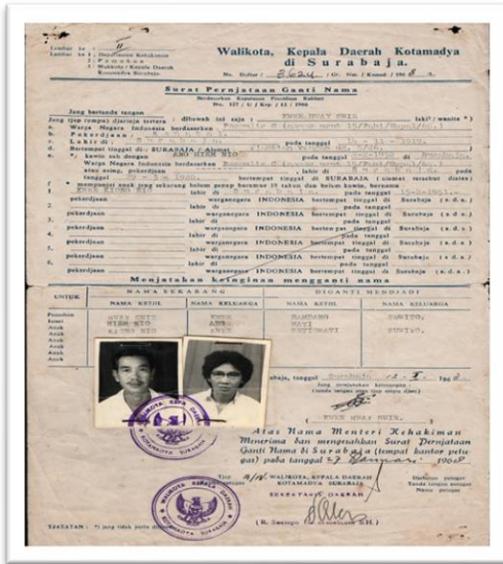
Selain itu, komunitas *Totok* China yang memiliki ikatan kuat dengan leluhurnya mendesak pemerintah Orde Baru untuk mengumumkan kebijakan identitasnya. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran 06/Preskab/6/67 yang memuat perubahan nama. Dalam peredarannya disebutkan bahwa orang Tionghoa perlu mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia dan penggunaan bahasa Tionghoa dilarang. Ini akan memungkinkan orang Cina dipantau oleh lembaga negara yang disebut Badan Koordinasi Urusan Cina (BKMC), yang merupakan bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin). Hal ini juga membuat orang Tionghoa sulit untuk menunjukkan identitasnya, terutama pada masa Orde Baru, di mana orang Tionghoa tidak dapat menikmati budayanya sendiri, seperti barongsai, imlek, dan dilarang menggunakan bahasa Mandarin¹⁵.

Gambar 2. Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 yang memuat mengenai perubahan nama Tionghoa ke nama Indonesia

¹³ Samsul Huda, "Orang Indonesia Tionghoa dan Persoalan Identitas", Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 1, (2010), hlm 17

¹⁴ *Ibid.*, hlm 169

¹⁵ Fibemsar, "G30S Militer dan Sejarah Kelam Etnis Tionghoa" <http://bem.fikom.unpad.ac.id/g30s-militer-dan-sejarah-kelam-etnis-tionghoa/>, diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 19.52 WIB



Sumber :

<https://twitter.com/idwiki/status/1372181490012880900?lang=fa>

Surat tersebut untuk membuktikan etnis Tionghoa merupakan rakyat Indonesia dan akan diakui jika mereka merubah nama Tionghoa menjadi nama Indonesia.

Adanya relasi kuasa-pengetahuan dalam kebijakan Orde Baru yang ditentukan oleh kemungkinan penggunaan dan penyesuaian yang diberikan oleh diskursus selama pergejolakan mengenai identitas etnis Tionghoa di Indonesia membuat pengetahuan tidak hanya bersifat akumulasi linear dari kebenaran yang telah diciptakan dari kekuasaan tetapi juga meliputi seluruh bentuk kekuasaan, retakan perpindahan pola pikir individual, serta pergeseran akibat – akibat dan aneka ragam bentuk saling ketergantungan satu sama lain yang ada di masyarakat sehingga pengetahuan bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya.¹⁶ Sehingga selama kebijakan dibuat oleh para penguasa membuat kedudukan etnis Tionghoa tersudut.

Pada masa penyatuan kembali negara Republik Indonesia, ada dua peristiwa yang dianggap sebagai pukulan menyakitkan bagi masyarakat Tionghoa, yaitu peristiwa G30S PKI tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Menurut Ibu Lan, peristiwa 1965 itu merupakan peristiwa yang menimbulkan trauma berat bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sementara itu, Bachrun dan Hartanto menyimpulkan setelah kerusuhan Mei 1998 terjadi krisis identitas di kalangan etnis Tionghoa, karena semua upaya untuk diterima dan berasimilasi sepenuhnya

dengan orang Indonesia sempat dihancurkan oleh kerusuhan Mei 1998¹⁷.

Akar permasalahan dari pemerintah Orde Baru yang meragukan nasionalisme keturunan etnis Tionghoa inilah membuat posisi identitas etnis Tionghoa menjadi rumit hingga tidak ada kejelasan, padahal identitas merupakan hal yang sangat penting guna menunjang adanya interaksi sosial dan menentukan bentuk interaksi sosial. Kebijakan diskriminatif yang diterima etnis Tionghoa baik secara politik dan sosial memunculkan “*sinophobia*”¹⁸ yang membuat masyarakat etnis Tionghoa sampai harus menyamarkan identitas dan kebudayaan mereka agar mereka tetap membaur dengan masyarakat Indonesia, yaitu dengan mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama yang lebih Indonesia.

Isu identitas nasional Tionghoa menemukan titik terang setelah pemerintah mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000, yang diumumkan pada 18 Januari 2000 oleh Presiden Abdurahman Wahid, dan dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Artinya, warga keturunan Tionghoa tidak lagi memerlukan izin khusus untuk mengungkapkan secara terbuka berbagai aspek terutama pada identitas, kepercayaan, budaya, dan tradisinya.¹⁹

Pandangan dan perlakuan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa

Pada masa sebelum Orde Baru, pemerintah membolehkan etnis Tionghoa melakukan semua kegiatan mulai dari kebudayaan hingga agama. Namun, tetap terjadi kesenjangan sosial yang berhubungan dengan keefektifan interaksi antar etnis Tionghoa dan etnis lainnya sehingga pada saat itu beberapa toko nasionalis dibawah Pak Asaat pernah meluncurkan program ekonomi yang disebut Program Benteng. Meskipun sistem Benteng dirancang untuk memungkinkan kelompok wirausaha Indonesia memajukan perekonomian nasional, program tersebut memberikan hak kepada pengusaha pribumi untuk melisensikan dan mengimpor kredit. Tujuan ini tidak tercapai dan hanya digunakan oleh kelompok elit politik untuk mengumpulkan kekayaan pribadi atau dana politik untuk menghindari mencapai kebijakan politik dan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan sentimen anti-Cina. Kerjasama program ini memungkinkan orang Indonesia lokal atau penduduk lokal yang tidak berpengalaman untuk menjual izin dan lisensi kepada orang Cina, memungkinkan orang Cina untuk

¹⁷ Fitri Eriyanti, “Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial” Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 1,(2010), hlm 29.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 30

¹⁹ Rebecca Burchell, *Community Perceptions about Keppres 6/2000: Case Study Yogyakarta* dalam Fitri Eriyanti, 2006, “Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial” Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 1,(2004), hlm 32.

¹⁶ Michel Foucault. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCisoD. (Terjemahan, Cet. Peretama, 2012) hlm: 250-252

melanjutkan bisnis mereka dan menghasilkan keuntungan, tetapi orang Indonesia lokal Mitra memiliki sedikit pengalaman bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi nasional.²⁰

Di era demokrasi terpimpin, pemerintah juga memberlakukan peraturan yang dianggap mendiskriminasi orang Tionghoa di bidang ekonomi, yaitu PP No. 10/1959 yang melarang orang Tionghoa berdagang di pedesaan. Hal ini dapat menyebabkan banyak insiden. Tentu saja, peraturan ini sangat membatasi peran dan hak finansial orang Tionghoa. Mereka hanya diperbolehkan berdagang sampai tingkat kabupaten, tidak sampai tingkat desa atau kecamatan. Dari tahun 1959 hingga 1960, dengan dukungan TNIAD, terjadi kampanye pengusiran orang Tionghoa, dengan 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia, 100.000 di antaranya kembali ke Tiongkok.²¹

Puncak dari diskriminatif ini yaitu, terjadinya Kerusuhan anti Tionghoa tahun 1966 yang terjadi diberbagai daerah yaitu Bandung, Surabaya, Solo, Malang, dan Medan. Kerusuhan ini terjadi karena krisis moneter yang membuat orang-orang Tionghoa terlibat dalam situasi politik-ekonomi saat itu, yaitu inflasi yang tinggi, barang-barang seperti kebutuhan pokok menjadi langka sehingga masyarakat menaruh kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi di bawah Presiden Soekarno dan kekecewaan ditujukan dengan mudah dan langsung kepada orang Tionghoa dan disebut dalam kerusuhan anti Tionghoa dan bagian dari kerusuhan ini juga merupakan perebutan antar kekuasaan politik²².

Selain itu peristiwa diskriminatif kepada etnis Tionghoa, pasca terjadinya peristiwa 30 september 1965 konflik sosial juga bermunculan di tengah masyarakat yaitu pembunuhan massal yang timbul setelah kudeta berdarah dan ditujukan masyarakat pribumi yang pro kepada anggota PKI²³, meskipun dalam peristiwa ini juga membawa etnis Tionghoa sebagai korban. Pembunuhan terhadap etnis Tionghoa ini lebih bersifat sporadis dan kurang sistematis karena hanya sebagian yang menjadi korban, dan lebih kepada kekerasan terhadap etnis

Tionghoa berupa pengerusakan harta benda milik etnis Tionghoa.

Setelah peristiwa 30 september 1965, aksi demonstrasi anti-Tionghoa pertama terjadi di Makassar pada tanggal 10 November 1965. Selain terjadi di Makassar, aksi – aksi brutal yang ditujukan kepada etnis Tionghoa juga terjadi diberbagai daerah di Indonesia/ munculnya prasangka di kalangan pribumi terhadap etnis Tionghoa bukanlah tanpa sebab, adanya beberapa factor yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk ini yaitu adanya aktivitas Baperki. Aktivitas Baperki merupakan organisasi etnis Tionghoa yang ideologinya condong kearah komunis sehingga menyebabkan meningkatnya kegiatan anti Tionghoa, terlebih lagi adanya tuduhan yang ditujukan kepada Baperki yang merupakan antek PKI dan RRC (Republik Rakyat Cina).²⁴

Sebelum Pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap situasi anti Tionghoa ini, pada 15 April 1966 sebanyak 15.000 etnis Tionghoa Indonesia berkumpul di Lapangan Benteng, Jakarta untuk mendengarkan sambutan pidato dari Menteri Luar Negeri Adam Malik yang menyerukan kepada etnis Tionghoa di Indonesia yang membuktikan kesetiaan mereka terhadap Negara Indonesia. Etnis Tionghoa Indonesia dalam rapat umum mengutuk tindakan RRC yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan menuntut kepada pemerintahan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC. Para demonstran juga menuntut untuk memulangkan orang Tionghoa asing kembali ke Tiongkok dan menuntut ditutupnya sekolah – sekolah Cina.²⁵

Menanggapi aksi demonstran yang dilakukan oleh orang Tionghoa Indonesia yang menghasilkan pernyataan kesetiaan terhadap Indonesia, pers Indonesia menanggapi dengan positif tetapi, menurut pers Indonesia, kesetiaan tersebut tidak akan ada artinya jika mereka masih mempertahankan keasingan mereka dalam berhubungan dengan etnis lainnya di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diharapkan orang Tionghoa Indonesia dapat merubah cara hidup mereka yang cenderung eksklusif untuk menghilangkan prasangka buruk kepada etnis Tionghoa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa dengan dimulainya Soeharto menjadi presiden dan saat itu mulailah penerapan kebijakan yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa. Istilah rezim pro-Barat telah membawa Indonesia menjadi Negara yang sangat diskriminatif pada etnis Tionghoa.²⁶ Setelah

²⁰ Daud, Ade Nurcahyo, Skripsi: “Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa” (Yogyakarta: 2016), hlm 23

²¹ *Ibid.*, hlm 30

²² Erik Muhammad, “Sejarah Kerusuhan Anti Cina di Indonesia Yang Jarang Terungkap”, Penelitian Charles A. Coppel berjudul “Tionghoa Indonesia Dalam Krisis”, (1997: 153) mengungkapkan bahwa pemerintah terancam putus hubungan dengan RRT apabila mereka tidak bertindak untuk menenangkan kerusuhan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk tenang dan memiliki prinsip alias tidak takut dengan ancaman RRT, tatkala RRT berencana untuk memutuskan hubungan kenegaraan, <https://www.harapanrakyat.com/2021/09/sejarah-kerusuhan-anti-cina-di-indonesia-yang-jarang-terungkap/> diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 08.41 WIB

²³ M Izzat, *G30S Militer dan Sejarah Kelam Etnis Tionghoa*, <http://bem.fikom.unpad.ac.id/g30s-militer-dan-sejarah-kelam-etnis-tionghoa/>, diakses pada 3 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB

²⁴ Koran Sulindo, “Ada Apa dengan Cina?” <https://koransulindo.com/ada-apa-dengan-cina/>, diakses pada 16 Februari 2022 Pukul 18.00 WIB

²⁵ Koran Sulindo, *loc.cit.*

²⁶ CNN Indonesia, “Melacak Sejarah Prasangka pada Etnis Tionghoa” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210210145438-20->

berakhirnya peristiwa 30 september 1965, ada trauma yang sangat dalam di kalangan etnis Tionghoa yang membuat mereka selalu menghindari keterlibatan bidang politik. Sejak awal berdirinya rezim Soeharto, ada keyakinan umum bahwa keturunan Tionghoa tidak memiliki sentiment kebangsaan. Orang – orang Tionghoa dicurigai telah mendukung politik kaum kiri karena RRC adalah Negara komunis sehingga memunculkan stigma bahwa sebagai Tionghoa dan keadaan sebagai Tionghoa telah terlibat dalam kudeta komunis 1965 dan dianggap menular dan menurun ke generasi selanjutnya.

Masalah Tionghoa di Indonesia yang berkaitan dengan sikap dan kebijakan pemerintah dianggap kurang tegas dalam persoalan kewarganegaraan orang – orang keturunan Tionghoa. Kebijakan asimilasi yang diterapkan selama Orde Baru dianggap menjadi salah arah karena muncul pandangan bahwa loyalitas orang – orang keturunan Tionghoa hanya dapat dicapai melalui kultur mereka saja dan selama masa awal pemerintahan Orde Baru banyak yang menjalin hubungan dengan orang Tionghoa untuk kepentingan ekonomi sehingga bersamaan dengan itu terjadinya konsolidasi kekuasaan Orde Baru orang Tionghoa terutama kalangan pemilik modal yang merapat ke kekuasaan dan memperoleh keuntungan ekonomi²⁷. Akibatnya orang Tionghoa mendominasi sector ekonomi yang luar biasa besarnya. Namun, sayangnya pemerintah kurang tanggap ketika para penguasa Orde Baru selalu menempatkan orang Tionghoa menjadi kambing hitam dari persoalan politik dikarenakan orang Tionghoa merupakan masyarakat apolitis dan menjauhkan diri dari kehidupan sosial politik.

Dampak kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa dalam sosial-ekonomi diantaranya²⁸:

1. Masalah SBKRI

Dengan Keputusan Presiden No. 56/1996 dan intruksi Presiden No. 4/1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No. 56/1996 yang mengutuksikan dicabutnya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI agar masyarakat Tionghoa tidak lagi disibukkan dengan bukti kewarganegaraan tambahan selain KTP. Namun, beberapa masyarakat Tionghoa menerima kebijakan asimilasi tersebut tetapi adapun yang enggan berganti nama menjadi nama Indonesia, dan

beberapa juga enggan untuk mencatatkan pernikahan di departemen yang terkait karena permasalahan di lapangan yang dirasa sulit serta syarat penarikan uang secara tidak legal. Hal ini dikarenakan aturan pencabutan SBKRI untuk etnis Tionghoa WNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak sejalan yang ada di lapangan dikarenakan masyarakat Tionghoa terus ditanya soal SBKRI untuk mengurus dokumen – dokumen Negara bagi orang asing khususnya etnis Tionghoa.

2. Bidang Ekonomi

Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada masa Orde Baru membuat para kelompok KKN menguasai ekonomi Indonesia dengan bersamaan muncul beberapa konglomerat berasal dari elit Tionghoa dan pribumi sehingga pada masa Orde Baru pengusaha yang dekat dengan kekuasaan bisnisnya akan berkembang menjadi besar. Hal ini terjadi karena konglomerat etnis Tionghoa seperti Liem Sioe Liong menjalin kedekatan dengan Soeharto dan menjadikannya salah satu konglomerat terbesar di Indonesia²⁹.

Melihat kenyataan tentang besarnya peran serta pengusaha Tionghoa dalam perekonomian Indonesia, terutama setelah datangnya para investor asing yang menanamkan modalnya dan bekerja sama dengan etnis Tionghoa hingga lahirnya percukongan yang menimbulkan KKN pada kekuasaan dan para pengusaha Tionghoa yang ikut terlibat didalamnya³⁰ maka muncul kritik – kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kritik tersebut diwujudkan dalam bukti aksi demonstrasi.³¹

Selain itu, pemerintah juga telah merekonstruksi kebijakan – kebijakan yang merugikan etnis Tionghoa melalui media massa (Koran). Pada saat itu media massa “Suara Karya” yang telah menyuarakan periode pemerintahannya Orde Baru melalui Koran sehingga banyak dari pembacanya menaruh kritik hingga dukungan yang pada kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Orde Baru setelah Soeharto memimpin³². Dan melalui media ini juga telah memberitakan capaian – capaian pemerintah terutama kebijakan yang telah dilakukan kepada etnis Tionghoa baik secara politik dan ekonomi sehingga pemerintah Orde Baru pada saat itu memaparkan kebijakan melalui media massa dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat sehingga pada saat itu media massa “Suara Karya” sering mendapatkan kritikan dari berbagai golongan yang terlalu pro kepada pemerintah Orde Baru.

[604775/melacak-sejarah-prasangka-pada-etnis-tionghoa-di-indonesia](https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/03/10/2017/tionghoa-dalam-sejarah-gelap-1965/) , diakses pada 15 Februari 2022 pukul 19.00 WIB

²⁷ Munawir Aziz, “Tionghoa dalam Sejarah Gelap 1965” Rezim Soeharto pada tahun 1965 meluncurkan kebijakan pemaksaan asimilasi bagi warga Tionghoa di Indonesia, kebijakan tersebut bersifat sangat merugikan etnis Tionghoa yang secara tidak langsung membatasi kebebasan Tionghoa untuk mengekspresikan identitasnya dan kultur budayanya (Inpres) No. 14 Tahun 1967, <https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/03/10/2017/tionghoa-dalam-sejarah-gelap-1965/> , diakses pada 3 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB

²⁸ Kumpara, “Budaya Tionghoa dan Kebijakan Politik Orde Baru”, <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/budaya-tionghoa-dan-kebijakan-politik-orde-baru-1549338267320595081> , diakses pada 16 Februari 2022, Pukul 20.30 WIB

²⁹ Ivanodei, “Korupsi, Nepotisme, dan Sistem Oligarki Soeharto di Masa Pemerintahan Orde Baru” <https://kumparan.com/sinagaivan47/korupsi-nepotisme-dan-sistem-oligarki-soeharto-di-masa-pemerintahan-orde-baru-1vXZmS1qbZV> diakses pada 4 Maret 18.00 WIB

³⁰ Ivanodei, *loc.cit*

³¹ Daud Ade Nurcahyo, *op. cit*, hlm 56-64

³² Dicky Prastya, “Peran Media Massa Dalam Menyuarakan Kebijakan Orde Baru: Studi Kasus Harian Suara Karya 1971-1974”, Jurnal Komunikasi (Jakarta: 2019), hlm: 95-100

Reaksi masyarakat setelah membaca kebijakan – kebijakan yang dimuat dalam Koran Suara Karya beragama ada yang pro dan kontra. Kritik yang tajam ditujukan mahasiswa terkait kebijakan yang dikeluarkan yang sangat merugikan masyarakat mengenai isu tentang investor asing yang disebut cukong dan media massa Koran pada saat itu menganggap istilah cukong ditujukan kepada seorang Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina yang mempunyai modal domestik. Dan modal domestik tersebut digunakan pemerintah untuk pembangunan sehingga memunculkan stigma prasangka buruk kepada etnis Tionghoa yang sesungguhnya tidak masuk akal.³³

Kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam Teori Foucault

Teori Foucault mengenai diskursus pengetahuan dalam relasi kuasa beroperasi secara terus menerus hingga menciptakan pengetahuan dan begitu sebaliknya, pengetahuan telah mengumsikan sebarang implikasi dari pengetahuan. Pengetahuan menurut Foucault sendiri ialah kalimat yang bisa diucapkan seseorang dalam suatu praktek diskursif (kekuasaan) dan tidak bisa dispesifikasikan oleh kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan satu ruangan dimana subyek bisa menempati satu posisi dan berbicara mengenai obyek – obyek yang dikenalnya dalam diskursus. Pengetahuan adalah wilayah koordinasi dan subordinasi pertanyaan – pertanyaan dimana konsep tampak, didefinisikan, diaplikasikan dan ditransformasikan.

Diskursus mengenai relasi kuasa yang dipaparkan oleh Foucault pada masa Orde Baru yaitu adanya kebijakan – kebijakan yang merugikan etnis Tionghoa, kebijakan yang dinilai sangat diskriminatif hingga membuat perpecahan hubungan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Perpecahan tersebut berlanjut hingga puncaknya dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya terjadi banyak sekali dampak yang ditimbulkan terutama dampak yang diterima oleh etnis Tionghoa, dampak tersebut paling banyak ialah kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang sering terjadi saat konflik sedang berlangsung.

Adanya krisis identitas sosial yang dialami oleh etnis Tionghoa selama Orde Baru berlangsung membuat mereka berusaha untuk membaur dengan masyarakat pribumi, namun upaya tersebut tetap tidak berguna dan sia – sia setelah memuncaknya aksi G30S PKI dan Kerusuhan Mei 1998 dimana kerusuhan anti Tionghoa terjadi hingga berujung kepada aksi kekerasan. Aksi kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan seksual yang menitik beratkan perempuan etnis Tionghoa sebagai korban kekerasan dan Setelah G30S PKI, rezim Orde Baru memiliki sentimen anti-Cina karena kesamaan antara orang Cina Indonesia dan orang Cina yang terlihat

membantu PKI. sehingga banyak masyarakat Indonesia memuncak amarah mereka dalam kerusuhan anti Tionghoa pada Tahun 1966 dan puncaknya kerusuhan tersebut terjadi pada Kerusuhan Mei 1998.

Selama kerusuhan terjadi sebuah pandangan yang diberikan oleh masyarakat pribumi yang sering memberikan pandangan buruk terutama pada bidang ekonomi sebagai dampak kebijakan Orde Baru dan hubungan yang merenggang antara etnis Tionghoa dengan pribumi menjadikan kekerasan seksual yang diterima perempuan etnis Tionghoa menjadi faktor kesengajaan yang dilakukan oleh persongkolan individu yang memiliki niat jahat atau merugikan guna menyingkirkan dan mengkambing hitamkan etnis Tionghoa melalui aksi yang dilakukan oleh etnis pribumi seperti yang telah dijelaskan dalam relasi kuasa pengetahuan Foucault bahwa kekuasaan telah melahirkan sebuah pengetahuan dan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para perokayasa untuk merebut kekuasaan di Indonesia dan menghasilkan sebuah isu – isu berupa pengetahuan agar etnis pribumi membenci etnis Tionghoa dengan melakukan kekerasan seksual yang sengaja disasarkan kepada perempuan karna perempuan yang mudah ditaklukkan oleh para pelaku dan dianggap sebagai pihak yang lemah sehingga ditempatkan sebagai subordinasi yang harus dikuasai.³⁴

Dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya kekerasan yang terjadi lebih ditujukan kepada perempuan etnis Tionghoa, hal ini dikarenakan perempuan dari golongan etnis dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan dan jika mengalami kekerasan seksual akan dianggap aib untuk menghancurkan kehormatan dari etnis tersebut.³⁵ Dan selama suasana kerusuhan Mei 1998 di Surabaya, kekerasan yang diawali dengan penghancuran dimulai dengan banyak sekali toko dan ruko milik etnis Tionghoa yang dijajah, dilempar batu, dan dibakar. Mereka masuk kedalam toko dan ruko milik etnis Tionghoa dan melakukan aksi keji yaitu penganiayaan. Kekerasan secara fisik bertubi – tubi diterima oleh etnis Tionghoa terutama perempuan etnis Tionghoa yang menerima banyak sekali kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan etnis Tionghoa beragam hingga membuat mereka trauma baik secara psikologis maupun fisik yang sangat membekas hingga saat ini.

Selama kerusuhan terjadi dan kekerasan seksual terus menimpa perempuan etnis Tionghoa menimbulkan penderitaan serta rasa takut yang berlebihan dan trauma yang membekas. Adanya simpangsiur mengenai jumlah korban pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 membuat seakan – akan korban atau pihak lain sengaja

³⁴ Arman Dhani, “Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa” <https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 20.00 WIB

³⁵ Fenny Purnawan, “Tragedi Mei 1998 dalam perjalanan bangsa disangkal!”, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2003), hlm. 30

memanipulasi kronologi pemerkosaan agar dapat meninggalkan Indonesia untuk menyelamatkan diri jika kerusuhan Mei masih berlangsung. Namun, adanya Komnas Perempuan dan TPGF memiliki laporan investigasi tiap tahunnya untuk mencatat dan menangani kasus kekerasan seksual yang dialami para korban dan berdasarkan kesaksian langsung dari para korban, Komnas Perempuan memastikan bahwa laporannya murni dari korban dan tidak ada sedikitpun manipulasi untuk menjatuhkan pihak manapun.³⁶

Jumlah temuan korban kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 di Surabaya yang berbeda – beda membuat adanya keraguan terhadap lembaga perlindungan perempuan terkait simpang siur mengenai korban dan memunculkan spekulasi bahwa jumlah korban sengaja diubah – ubah untuk menjatuhkan Indonesia.

Perbandingan jumlah korban kekerasan seksual dari 3 data laporan dari pelapor di Surabaya.

Laporan/Pelapor	Jumlah korban pemerkosaan	Jumlah korban penyiksaan seksual	Jumlah korban pelecehan seksual
KontraS (Komite untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan)	10 korban	2 korban	10 korban
Gema Sukma dan Kelompok perempuan pro demokrasi (KPPD)	19 korban	6 korban	10 korban
Komnas Perempuan dan TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta)	10 korban	3 korban	3 korban

Data berdasarkan rekam jejak Komnas Perempuan dan Cegah Komnas Perempuan dan kesaksian para pelapor di Surabaya pada Tahun 1999 – 2002

Dari 3 data pelapor tersebut hampir memiliki kesamaan dan perbedaan mengenai jumlah korban kekerasan seksual, jumlah korban yang mengalami perbedaan menurut wawancara Usman Hamid perbedaan tersebut terletak pada korban kekerasan seksual yang lebih memilih diam dikarenakan korban kekerasan seksual merupakan orang yang sedang menghadapi sebuah ancaman atau ketakutan sehingga banyak sekali perempuan etnis Tionghoa pada saat memilih diam sebagai salah satu respon terhadap sikap *freeze* alias membuat.

Dalam diskursus Foucault mengenai seksualitas yang ditujukan terhadap perempuan etnis Tionghoa merupakan hasil dari relasi – kuasa. Foucault menyebutkan dalam penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran yang sebelumnya bersifat alamiah, ternyata tidak bisa lepas dari limitasi, seleksi, dan kontrol dari banyaknya formasi non diskursif.

Diskursus tentang kegilaan, politik, ataupun seksualitas menjadi pengetahuan yang pencapaiannya terarahkan pada pencapaian kekuasaan. Dalam konteks pembahasan peneliti disini kekuasaan diartikan represif dan kadangkala opresif dengan adanya dominasi subjek dan objek kekuasaan mengenai kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Selama kerusuhan terjadi kekuasaan yang mendominasinya dan menjustifikasi sesuatu benar atau salah termasuk tindakan kekerasan seksual beserta pandangan etnis lainnya terhadap etnis Tionghoa. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki politik kebenarannya sendiri – sendiri sehingga adanya sentimen dan rasisme karna adanya kekuasaan yang menghasilkan kebenaran subyektif karena telah melibatkan sebuah pengetahuan baru yaitu sentimen dan rasisme tersebut.

Isu gender yang ada dalam kerusuhan Mei 1998 menjadi persoalan sosial dalam masyarakat dikarenakan pihak perempuan sangat dirugikan dalam konflik ini, kelompok teori – teori *nurture* melihat adanya perbedaan karakter dan peran sosial antara laki – laki dan perempuan dan lebih ditentukan oleh factor sosial-budaya dan prespektif ini menyimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan yaitu relasi – kuasa sehingga sangat memungkinkan terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan saat kerusuhan terjadi dikarenakan adanya relasi kuasa budaya yang menjadikan perempuan sebagai target yang sangat rentan untuk disakiti. Sebuah sudut pandang kritis akan menemukan gagasan gender ini yang mengarah pada ketidakadilan perempuan, dengan perempuan menjadi korban utama. Kekerasan seksual, beban ganda, stigma, pengucilan sosial, kemiskinan, ketergantungan dan diskriminasi dalam segala aspek kehidupan perempuan adalah contoh dari ketidaksetaraan gender. Memperluas perspektif ini dan mengembangkan pemikiran kritis saat ini merupakan faktor penting dan mendasar dalam mencegah kelompok konservatif menggunakan tubuh perempuan untuk kekuasaan mereka dan memaksa kehidupan perempuan ke dalam ruang lingkup pribadi³⁷.

Adanya konstruksi gender dalam relasi kuasa yang dikembangkan oleh persekongkolan individu yang memiliki niat merugikan menjadikan kerusuhan Mei 1998 dan setelah perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual, mereka sulit melapor

³⁶ Laporan tiga tahun pertama Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 1998 – 2001 pada Oktober 2001.

³⁷ Institut Kapal Perempuan, “Perempuan Dalam 20 Tahun Reformasi Indonesia” <https://kapalperempuan.org/perempuan-dalam-20-tahun-reformasi-indonesia/> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 19.26 WIB.

dikarenakan adanya budaya patriaki yang lebih menyalahkan korban kekerasan seksual dan adanya sebuah ancaman yang semakin membuat korban untuk melaporkan aksi kekerasan seksual kepada lembaga perlindungan mengingat banyaknya relasi kuasa yang dominan saat kerusuhan Mei 1998 terjadi³⁸.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya” dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998 di Surabaya menghasilkan sebuah pengetahuan seperti yang telah dijelaskan dalam teori Foucault, pengetahuan dan kebenaran ini menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasaran empuk untuk dijadikan korban dan etnis Pribumi sebagai pelaku penjarahan sekaligus korban.

Kedua, kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan etnis Tionghoa adalah hasil dari faktor kesengajaan dari kuasa pengetahuan yang dilakukan para persekongkolan antar individu/kelompok kuasa selama kerusuhan berlangsung dikarenakan etnis Tionghoa merupakan sumber kemarahan dan kebencian agar dapat mengacaukan politik dan merebut kekuasaan.

Ketiga, para persekongkolan individu/kelompok kuasa berharap pandangan etnis lain terhadap kekerasan seksual yang diterima perempuan etnis Tionghoa setelah kerusuhan berakhir dengan tidak peduli dan membenarkan aksi tersebut. Namun, harapan tersebut tidak sejalan dengan semestinya karna banyak perempuan dari berbagai etnis saling bahu membahu menolong perempuan etnis Tionghoa untuk mendapatkan keadilan.

Keempat, teori diskursus relasi-kuasa Foucault dalam hubungan etnis lain dengan etnis Tionghoa memiliki point penting yaitu lahirnya sumber kemarahan dan perasaan curiga kepada etnis Tionghoa sebagai penyebab krisis moneter selama kepemimpinan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah dirancang oleh sekelompok kuasa yang memiliki niat merugikan. Namun, stigma ini terpatahkan saat perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual.

Kelima, banyaknya rasa solidaritas yang berdatangan setelah kerusuhan terjadi membuat hubungan etnis lain dengan etnis Tionghoa berjalan dengan baik meski sebelumnya terdapat banyak sekali rekayasa kuasa untuk menyalahkan etnis Tionghoa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, meneliti memberikan saran dalam pembelajaran sejarah bahwa

kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya merupakan bagian dalam peristiwa sejarah secara kronologis menurut rentetan waktunya yang fenomenanya diangkat dalam sejarah. Dalam penelitian ini, memiliki kontribusi dalam pembelajaran sejarah untuk membangun pemahaman mengenai peristiwa kekerasan etnis Tionghoa yang telah terjadi di masa lampau dan hubungannya masa kini dapat dipahami dan jalani oleh siswa melalui pembelajaran sejarah. Selain itu, pembelajaran mengenai fenomena kekerasan etnis Tionghoa ini tidak hanya berhenti pada pembelajaran faktanya saja yang mengacu pada membeberkan kisah – kisah secara kronologis, dikarenakan akan terjadinya kecenderungan belajar sejarah sebagai hafalan saja, pembelajaran sejarah mengenai fenomena ini harus berdasarkan rentetan waktu berdasarkan tahun terjadinya (kronologis), tetapi pembelajaran sejarah yang memberikan makna tidak akan berhenti sampai pemberian waktu secara kronologis sehingga dalam belajar sejarah mengenai kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam Kerusuhan Mei 1998 dapat memaknainya dengan peristiwa sejarah lainnya seperti peristiwa sejarah apa saja yang terjadi selama Orde Baru terjadi dan pada akhirnya dengan inti apa yang dapat diambil dari pembelajaran sejarah dari peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut memberikan pandangan dan kemampuan dalam mengembangkan nalar siswa dalam belajar sejarah? Ataukah kisah sejarah mengenai kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa selama Kerusuhan Mei 1998 hanya sekedar kisah yang diketahui siswa lalu dilupakan?

Kemudian kontribusi penelitian ini dalam pembelajaran sejarah Indonesia yaitu, memberikan banyaknya pengetahuan dalam bentuk historiografi peristiwa sejarah yang mengangkat isu – isu mengenai kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam peristiwa masa Orde Baru yang jarang dikaji dalam Sejarah Indonesia, serta tujuan peneliti untuk memaparkan alasan kenapa kekerasan lebih terjadi terhadap perempuan etnis Tionghoa dan pandangan masyarakat pribumi mengenai etnis Tionghoa yang memunculkannya tindakan diskriminasi terhadap perempuan etnis Tionghoa dapat ditujukan melalui historiografi yang terangkum dalam artikel ini.

³⁸ Institut Kapal Perempuan, *Loc. Cit.*

Daftar Pustaka**Surat Kabar:**

Koran Warta Bhakti, 1965, edisi Manipol-USDEK
Koran SinPo, Oktober 1960, edisi Panjawarta

Buku:

Angraeni, Dewi. 2014. *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Burke, Peter. 2015. *Sejarah dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Wirawan, Yerry. 2013. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Dawis, Aimee. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pusat Data dan Analisa Tempo. 2019. *Tionghoa dan Politik Indonesia*. Jakarta: TEMPO Publishing.

Satriyo, Anastasia. 2018. *Human, Refleksi 23 Tahun Perempuan Setengah Tionghoa*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Brata, Sumadi Surya. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Kasenda, Peter. 2015. *Hari – Hari Terakhir Orde Baru Menelusuri Akar Kekerasan Mei 1998*. Depok: Komunitas Bambu.

Husudo, Siswono Yudo. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Padamu Negeri.

Tobing, Fredy B.L. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997 – 1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal:

Ikasari, Prinsia Nurul. 2017. *Perempuan dalam Diskriminasi Etnis Di Indonesia (Analisi Film Sapu Tangan Fang Yin)*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media. Vol. 1. No. 1.

Titulanita, Fuji., dkk. 2015. *Kerusuhan Pasar Glodok: Studi Kasus Etnis Tionghoa Di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat*. Jurnal Publika Budaya. Vol. 1. No. 3. Hlm. 10-19.

Hutahean, Juliandry, 2014. *Dampak Kerusakan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998 – 2003*. Journal of Indonesia History. Vol. 3. No.1. Hlm. 27-33.

Salim, Lydiana., dan Akhmad Ramdhon. 2020. *Dinamika Konflik Kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta Melalui Perspektif Korban*. Journal of Development and Social Change, Vol. 3, No.1.

A F, Muhammad Rifa'at. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*. Jurnal Studi Gender. Vol. 14, No. 2.

Situs Web:

Anshori, Aan. 2018. "Mei 98 di Surabaya: Raja Pengemis dan Yoni Yang Terkoyak", <https://asumsi.co/post/mei-1998-surabaya-raja-pengemis-terkoyak>, diakses pada 2 Januari 2020 pukul 19.50

Kompas. 2021. "Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap perempuan yang Kerap Dilupakan". <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/13/21000081/retrospeksi-tragedi-mei-1998-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-kerap?page=all>, diakses pada 9 Juli 2021 pukul 07.16

Lestari, Sri. 2018. "Perkosaan Mei 1998 'tak pernah terungkap, tak pernah tuntaskan'", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44134808>, diakses pada 19 Februari 2021 pukul 19.20

Wawancara:

Irawan, Bingky interview. 2002. "The May 1998 Riot in Surabaya: Through Local People's Perspective". Surabaya

Mistur interview. 2021. "Warga pribumi yang bekerja dengan etnis Tionghoa". Surabaya

Sri interview. 2021. "Warga etnis Tionghoa di Tambak Bayan Surabaya". Surabaya

Xiao, Yan interview. 2021. "Warga etnis Tionghoa di Surabaya". Surabaya

Kiai, Sang interview. 1998. "The May 1998 Riot in Surabaya: Through Local People's Perspective". Surabaya

Wahyuni, Sri interview. 2021. "Warga pribumi Surabaya yang merasakan dampak kerusakan Mei 1998 di Surabaya". Surabaya

Johanes interview. 2021. "Pasca G30S PKI, rezim Orba memilki sentiment terhadap etnis Tionghoa". Surabaya

Minarto interview. 2021. "Warga pribumi yang melihat kerusakan Mei 1998 di Surabaya". Surabaya